

KOTA BANDUNG SEBAGAI SUBNATIONAL GOVERNMENT DALAM KERJASAMA SMART CITY DENGAN KOTA SEOUL TAHUN 2016-2019

Fahrisya Tiko Septiarika^{1*}, Randy Bramastya²,

¹Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta Selatan, ²Universitas Airlangga Surabaya

¹²Jurusan Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Abstrak

Hubungan internasional telah mengalami perluasan aktor. Liberalisme menjadi pintu depan untuk membuka ruang seluasnya bagi aktor internasional untuk terlibat dalam urusan kerjasama dalam suatu relasi transnasional menurut Keohane dan Nye. Aktor internasional ini juga tidak terbatas pada sektor swasta, tetapi juga pemerintah daerah. Tulisan ini melihat peran kuat pemerintah daerah menurut Duchacek dan Soldatos sebagai aktor subnational government yang menjalin hubungan dengan subnational government lain atau local government yang ditunjuk sebagai mitra. Dalam penelitian ini, pemerintah Kota Bandung dan kota mitra yakni Seoul menjalin membangun aktivitas internasional lewat kerjasama Smart City yang implementasinya dapat dikenali dalam kemitraan Sister City tahun 2016-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam peran pemerintah Kota Bandung sebagai subnational government lewat advokasi kebijakan dan relasinya secara transnasional yang dibangun lewat pendekatan kualitatif sehingga dapat menghadirkan penjelasan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang mengkaitkan data sekunder sebagai penjelasan. Data sekunder yang digunakan antara lain laporan dari KSP, rencana induk pengembangan smart city, dan sumber lainnya. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah Kota Bandung melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberi wewenang untuk dapat menyelenggarakan kerjasama luar negeri yang menjadi representasi menjalankan fungsi pelengkap untuk mengurus urusan luar negeri yang dapat menguntungkan yurisdikasinya.

Kata kunci: kerjasama luar negeri, smart city, kota bandung, kota seoul, pemerintahan subnasional

Abstract

International relations has experienced an expansion of actors. Liberalism serves as gate to welcome the widest possible space for international actors to be involved in foreign affairs in a transnational relationship according to Keohane and Nye. These international actors are also not restricted to the private sector, but also local governments. This paper examines the stronger role of local governments according to Duchacek and Soldatos as subnational government actors which establish relationships with other subnational governments or local governments appointed as partners. This study, the government of Bandung City and the partner city, Seoul, established international activities through the Smart City collaboration, whose implementation can be recognized in the 2016-2019 Sister City partnership. This study aims to determine in role of the Bandung city municipal as a subnational government based on policy advocacy and its transnational relations built through a qualitative approach that it can present a descriptive explanation. This study uses a literature study approach that links secondary data as an explanation. Secondary data used include reports from KSP, smart city development master plans, and other sources. This study comes to the conclusion that the Bandung City government through Law Number 23 of 2014 is given the authority to be able to carry out foreign cooperation which is a representation to carry out complementary functions to take care of foreign affairs which can benefit its jurists.

Keywords: *transnational relations, smart city, bandung municipal, seoul municipal, subnational government*

PENDAHULUAN

Transformasi hubungan internasional telah bergeser dari isu yang bersifat *high politics*

seperti isu keamanan, konflik dan peperangan yang cenderung mengedepankan *hard power* menuju isu-isu kerjasama [1]. Arus globalisasi mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari interaksi dan kerjasama antar negara. Seluruh aspek dari negara diharapkan terus bergerak maju untuk menghadapi era globalisasi serta meningkatkan segmentasi yang cepat di berbagai bidang [2]. Ini yang mendorong negara untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya dimiliki. Dalam sudut pandang liberalisme klasik Kantian, praktiknya kerjasama menjadi *tool*

Alamat Korespondensi Penulis:

Fahrisya Tiko Septiarika, Randy Bion Bramastya

Email : fahrisyatiko3@gmail.com,
randybram2000@gmail.com

Alamat : Jl. Lenteng Agung Raya No.32, Lenteng Agung,
Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12610; Kampus B
Dharmawangsa Dalam, Airlangga, Kec. Gubeng,
Kota SBY, Jawa Timur 60286

paling efektif guna mengkatalisasi kooperasi antarnegara. Sedangkan diplomasi menjadi kendaraan strategis untuk merealisasikannya [3]. Sejak 1960-an, Quebec mulai menguatkan perannya (seperti misi perwakilan yang dikenal sebagai *Les Maisons Que'bec*) yang dimaksudkan untuk mempromosikan dan memajukan klaimnya. Pada tahun 1960an, apa yang dilakukan oleh Quebec tampak menjadi fenomena baru di luar tradisi kerjasama dalam hubungan internasional. Namun demikian, ini mencerminkan tren dalam hubungan internasional yang telah dimulai dan yang akan semakin populer sepanjang abad 21 bahkan telah semakin relevan hingga tahun 2020. Hal ini mengandung arti praktik diplomasi di luar tradisi diplomasi hubungan internasional mengambil peran yang semakin kuat dan relevan.

Berdasarkan Duchacek (1984), McHugh (2015), Mattioli dan Rodrigues [4] dan Aldecoa [5] yang kesemuanya menggunakan kata *subnational government* untuk merujuk pada pemerintahan kota atau pemerintahan daerah, maka tulisan ini menggunakan penyebutan yang sama untuk merujuk pada pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Kota Seoul.

Dalam hal ini, hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul merujuk pada *Global Paradiplomacy*, mengingat hubungan diplomasi yang dilakukan antara kedua kota tersebut berasal dari negara yang berbeda dan bahkan kawasan yang berbeda. Kota Bandung berasal dari Republik Indonesia berada di kawasan Asia tenggara, sementara Kota Seoul berasal dari Republik Korea Selatan yang berada di kawasan Asia Timur. Kedua pemerintah sub nasional tersebut bahkan tidak saling berbatasan secara langsung.

Pemerintah telah menyadari diplomasi tak hanya bertumpu pada negara, melainkan aktor-aktor hubungan internasional lainnya seperti Pemerintah Daerah [6]. Kissinger [7] bahkan menyebut kondisi dalam negeri turut mempengaruhi pelaksanaan politik luar negeri setiap negara. Selain itu, sebutan *subnational government* yang merujuk pada pemerintah daerah (*local government* atau *municipal*) juga muncul dalam Soldatos sebagai penggagas utama *paradiplomacy*. Demi konsistensi, tulisan ini menggunakan literasi *subnational government* yang perannya menonjol dalam praktik kerjasama *Sister City* [8].

Peran aktif pemersintah daerah sebagai *subnational government* lebih jauh diterangkan dalam kebijakan otonomi daerah dalam Undang

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang diperbarui dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 367 dan pasal 7. Undang undang tersebut mengakui kebutuhan pemerintah daerah demi menjamin pembangunan yang menyejahterakan masyarakat maka *subnational government* diijinkan untuk menjalin kerjasama dengan entitas luar negeri. Sementara kementerian luar negeri sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri [9]. Kehadiran undang undang tersebut memperkuat peran dan wewenang *subnational government*. Pemerintah daerah diakui sebagai perannya sebagai pelaku hubungan luar negeri [10].

Dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah kota juga dapat meluaskan akses kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri. Salah satu inisiasi kerjasama yang banyak dilakukan di berbagai *subnational government* lain yakni *Sister City*. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Sister City International*, suatu organisasi internasional *non-profit* bidang kerjasama kota kembar yang dibentuk oleh Dwight Eisenhower 63 tahun yang lalu, setidaknya terdapat lebih dari seratus negara menjalin kerjasama *Sister City* satu sama lain [11].

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam peran pemerintah Kota Bandung sebagai *subnational government* dan relasinya secara transnasional yang dibangun lewat pendekatan kualitatif sehingga dapat menghadirkan penjelasan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang mengkaitkan data sekunder sebagai penjelasan. Data sekunder yang digunakan antara lain laporan dari KSP (Knowledge Sharing Program), rencana induk pengembangan smart city, dan sumber lainnya. Peran *subnational government* akan dibedah menggunakan konseptualisasi *policy advocacy* menurut Mattioli dan Rodrigues (2017) yang didalamnya mengenali aktor berdasarkan proses transfer kebijakan dan difusi kebijakan dari Seoul ke Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subnational government adalah seluruh perangkat pemerintah daerah yang menjalankan fungsi urusan luar negeri di luar urusan luar

negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah nasional. Pemerintah daerah Kota Bandung dalam praktiknya merupakan gabungan kepentingan dari banyak pihak. Mereka adalah dinas dalam lingkungan pemerintah Kota Bandung seperti pemerintah Kota Bandung bagian kerjasama luar negeri, dinas komunikasi dan informatika, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, badan perencanaan dan pembangunan, dan konsultan yang ditunjuk yakni LAPI ITB.

Tipe aktor yang terlibat terdiri atas aktor internal yakni yang memainkan peran dan mengupayakan membuat keputusan terkait kebijakan publik. Kedua, aktor eksternal yakni aktor yang menjadi bagian dari pemerintahan *subnational* yang kebijakan publiknya diadopsi; ketiga, adalah the *go-between* yakni aktor non pemerintah yang tidak terlibat langsung dalam proses transfer dan difusi kebijakan, tetapi diikutsertakan dalam diskusi advokasi kebijakan (Graham et al., 2012).

Sedangkan aktor spesifik terdiri atas: 1) politisi terpilih dan atau pejabat terpilih, 2) partai politik, 3) birokrat dan pegawai negeri sipil, 3) kelompok advokasi, 4) tim ahli dan pebisnis, 5) perusahaan multinasional, 7) lembaga think-tanks, 8) organisasi internasional dan supranational, 9) organisasi non pemerintah dan 10) konsultan (Dolowitz & Marsh, 1996)

Terdapat tiga proses yang terjadi dalam *policy transfer* yakni: *learning*, *competition* dan *coercion*. *Policy transfer learning* adalah proses ketika kebijakan dari suatu pemerintahan *subnational* diijinkan untuk menggunakan secara sukarela sebagai pedoman atau panduan kebijakan pada pemerintahan *subnational* lainnya. Dengan ini maka ada proses advokasi kebijakan terjadi secara dan atas kemauan bersama atau memiliki *mutual will*.

Policy transfer competition, menempatkan pemerintah Kota Bandung yang mendorong secara mandiri belajar kebijakan dan lebih proaktif dalam mendapatkan advokasi kebijakan dari pemerintah Seoul. Motivasi ini sebagian besar berasal dari keinginan agar dapat menyaingi keunggulan Kota Seoul dan menjadikan Kota Bandung lebih baik daripada sebelumnya.

Policy transfer coercion, menempatkan Pemerintah *subnational* – pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan advokasi kebijakan dari Kota Seoul didasarkan atas tuntutan sebagai bagian dari suatu organisasi internasional atau anggota dari organisasi internasional.

Melalui bagian tulisan ini, peran pemerintah Kota Bandung sebagai *subnational government* dalam merealisasikan kerjasama smart city dalam kemitraan sister city lewat *policy transfer* dan perannya dalam masing-masing jenis *policy transfer* tersebut di atas. Upaya tersebut dapat dikenali dengan meneliti peran aktor-aktor yang terlibat secara signifikan.

Untuk mengenali aktor yang terlibat maka telah dilakukan wawancara dengan ibu Christine Mugia Restu, S. IP., Bagian Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Kota Bandung yang menyatakan:

“Dalam pertemuan tersebut, Pak Ridwan Kamil memperkenalkan proyek pembangunan LRT dan MRT Kota Bandung dengan harapan para investor Korea Selatan berminat dalam pembangunan proyek tersebut. Alhamdulillah, para pengusaha tersebut setuju untuk mempelajari lebih dalam mengenai Kota Bandung dan mempertimbangkan untuk ikut serta dalam proyek LRT. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan anggaran tambahan dari perusahaan swasta yang berasal dari Korea Selatan yaitu PT Total Solution Intelligent. Pihak pengusaha dari Korea Selatan ini berkomitmen untuk memberikan 20-25 miliar rupiah untuk dua jembatan layang yang akan dibangun di Kota Bandung.”

Menggunakan konseptualisasi tersebut, maka dikenali aktor yang paling signifikan terlibat adalah politisi terpilih yakni walikota sedang menjabat (*incumbent*). Aktor signifikan kedua adalah pebisnis diikuti oleh konsultan pada posisi berikutnya.

Yang menjadikan temuan ini semakin menarik adalah kepentingan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat. Walikota tentunya memiliki motivasi yang berbeda dengan pebisnis maupun konsultan dalam menjalankan perannya.

Walikota memiliki motivasi yang terdiri atas sejumlah preferensi, tujuan-tujuan serta kapabilitas yang melekat. Motivasi Walikota Bandung dipengaruhi oleh kepribadiannya yang cukup visioner. Ia ingin melihat Kota Bandung agar memiliki wajah lebih baik. Ia menyadari seluruh problem Kota Bandung karena ia tumbuh dan besar di Bandung. Pengalamannya yang diperoleh dengan belajar dan bekerja di Amerika Serikat membuat ia memiliki visi bagaimana

baiknya Kota Bandung dikelola. Ia melihat terdapat solusi untuk mengatasi persoalan Kota Bandung yang sebagian besar terpusat pada tata kelola kota. Kota Bandung tidak dapat dipungkiri telah berkembang sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. Ia menjadi pusat bisnis, pusat wisata belanja dan kuliner, serta pusat fashion di wilayah Jawa Barat.

Ia juga melihat potensi Kota Bandung dengan tata kelola dan manajemen yang baik dapat bersanding dengan kota-kota di negara maju. Salah satunya ialah Kota Seoul yang berangkat dari similaritas yang sama meskipun masih terdapat nilai unik dan kearifan lokal yang sangat khas. Selain itu, saat ini tengah berkembang tren menuju tata kelola pemerintahan yang lebih "smart" yakni dengan memanfaatkan perkembangan inovasi dan teknologi serta mengajak masyarakat untuk lebih partisipatif dalam tata kelola kota. Hal ini juga tengah dilakukan oleh beberapa kota lain yakni Surabaya yang menjalin *sister city* dengan Kota Xiamen [12, 13].

Bisa dikatakan, tren tata kelola kota di Indonesia saat ini mencoba untuk *mengikuti smart city*. *Sister City* hanyalah salah satu program yang kemudian dipilih dan dikembangkan sesuai dengan preferensi yang diinginkan. Untuk itu setelah terpilih sebagai walikota, Ridwan Kamil, kemudian bergerak untuk merancang sejumlah perbaikan dan restrukturisasi fasilitas-fasilitas di Bandung. Salah satunya adalah dengan sigap merancang inovasi kebijakan publik yang lebih dekat pada masyarakat. Ia pula segera mendorong jajarannya untuk segera menerapkan sistem administrasi dengan SSO atau *Single Sign On*. Di saat yang sama, sebagaimana telah memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang arsitektur, Ridwan Kamil kemudian mulai merancang untuk memperbaiki wajah sungai-sungai di Bandung. Salah satu realisasinya adalah revitalisasi Sungai Cikapundung.

Revitalisasi sungai ini bermanfaat untuk memelihara kebersihan sekaligus menciptakan ruang terbuka, di saat yang sama juga mempromosikan kota yang lebih indah aman, dan bersih. Di sisi penerapan inovasi dan teknologi, Bapak walikota sangat mendorong agar terdapat sejumlah titik Wi-Fi yang dapat diandalkan di sejumlah ruang terbuka publik di seluruh kota Bandung. Hal ini terealisasi melalui penambahan infrastruktur Taman Flexi – sebutan yang diberikan pada ruang-ruang terbuka publik dengan fasilitas Wi-Fi – hingga taman Film di

Jalan Layang Pasupati. Bagian ini telah dijelaskan pada Tabel 4.7 Program Kerjasama Smart City dalam Kemitraan Sister City di Kota Bandung dan Kota Seoul.

Sedangkan pebisnis, memiliki motif yang berorientasi keberlanjutan usaha dan keuntungan yang dapat diperoleh di masa depan. Motif pebisnis sangat mudah dikenali. Pebisnis yang terlibat sesuai dengan hasil wawancara sebagian besar berasal dari Korea Selatan. Wawancara belum menemukan apakah terdapat pebisnis asli Kota Bandung yang kemudian tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Kota Seoul dengan lokasi investasi di Kota Seoul. Sedangkan di Kota Bandung, beberapa kali terdapat implementasi kerjasama dalam berbagai program yang dilaksanakan di Kota Bandung. Sejumlah kerjasama tersebut telah disampaikan pada bagian tulisan sebelumnya. Kerjasama ini tertuang pada kolom Smart Living. Adapun kerjasamanya terdiri atas kunjungan delegasi Korean Exim Bank bersama tim KSP *Dissemination seminar*, investor dari Posco Steel Korea, dan kemitraan dengan perusahaan swasta yakni PT Total Solution Intelligent. Selain itu juga terdapat komunikasi yang terjadi dalam pertemuan ASEAN Connectivity Forum bersama Korea Selatan yang digagas oleh kedua pihak yang didalamnya mengundang pebisnis Korea Selatan untuk menjajaki peluang berinvestasi dalam pembangunan proyek LRT.

Motivasi ini erat dengan kepentingan ekonomi. Masih membuka sejumlah pertanyaan apakah ada kesepakatan di balik adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah Kota Bandung dengan pebisnis dari Korea Selatan. Motif ini dapat dijelaskan menggunakan perspektif liberalisme ekonomi dan neoliberalisme ekonomi bahkan menggunakan pendekatan kapitalisme. Namun, persoalan tidak dijelaskan lebih lanjut karena bukan bagian dari ruang lingkup penelitian. Karena itu, bermanfaat sebagai ruang untuk penelitian selanjutnya.

Inti dari kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan pebisnis Seoul adalah untuk mengenalkan ruang kerjasama bersama yang dapat memberi keuntungan yang bersifat *win-win solution*. Sejauh ini kerjasama Indonesia lewat pemerintah nasional sebagian besar telah didominasi cukup lama oleh investor dari negeri Jepang. Sedangkan negeri China baru datang dalam dua dekade ini untuk kemudian menjadi sumber diversifikasi investasi yang masuk ke Indonesia. Korea Selatan masih merupakan pemain baru di bidang investasi di Indonesia.

Pengaruhnya pun baru menguat pasca kedatangan *Hallyu Wave* ke Indonesia, membuat kehadiran pengaruh Korea Selatan menjadi lebih signifikan.

Peran konsultan dan kontribusinya cukup strategis. Dalam merumuskan dan mendesain *smart city*, pemerintah Kota Bandung telah menjalin kerjasama dengan konsultan ahli di bidang *Smart City*. Meskipun informasi tentang konsultan tersebut tidak disebutkan secara rinci oleh informan dalam proses wawancara, peneliti berhasil menemukan produk dari konsultan yang memuat *master plan* pengembangan desain *smart city* Kota Bandung. Fungsi konsultan tidak berpengaruh langsung dengan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif pemerintah daerah terkait dengan program *smart city* dan *sister city*.

Konsultan berperan untuk melakukan kajian dan mengukur peluang pengembangan smart city yang bermanfaat untuk mengukur peluang kemitraan sister city. Master plan berjudul "Penyusunan Rencana Induk Bandung Kota Cerdas" tersebut berisi sejumlah hal teknis seperti yang terangkum dalam suatu city profiling yang komplis dan komprehensif di saat yang sama juga visibel untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Produk konsultan tersebut bermanfaat sebagai bahan kajian yang diperlukan untuk kemudian melangkah ke pengembangan *Smart City* yang lebih serius sekaligus melihat dengan lebih ambisius di masa mendatang. Peran dan upaya konsultan dapat ditelusuri pada penjelasan yang mana terdapat upaya untuk menjalin komunikasi dalam proses *policy transfer – diffusion* yakni advokasi dari Seoul.

Sedangkan peran konsultan di pihak Kota Seoul dilaksanakan dengan melibatkan lembaga independen yang disebut dengan KSP atau *Knowledge Sharing Program*. Knowledge Sharing Program adalah salah satu lembaga yang dibentuk di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi Pemerintah Korea Selatan. KSP bermanfaat untuk menyediakan advokasi kebijakan sehingga transfer dan difusi kebijakan berjalan sesuai dengan koridor yang disepakati dengan tidak meninggalkan keuntungan dan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat.

Berdasarkan paparan tersebut, maka analisis peran aktor spesifik menurut Mattioli dan Rodrigues (Rodrigues & Mattioli, 2017a) telah dirinci. Sedangkan berdasarkan tipe aktor yang terdiri atas tiga yakni *internal*, *eksternal* dan *go-between*, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Peran aktor tipe internal yang sangat berperan dalam mendorong upaya realisasi kerjasama *Smart City* dan Kemitraan *Sister City* adalah walikota Bandung dan walikota Seoul. Upaya komunikasi aktif untuk menjemput advokasi kebijakan dilakukan Pemerintah Kota Bandung atas instruksi dan visi misi Walikota terpilih. Sedangkan peran aktor tipe eksternal terletak pada pemerintah Kota Seoul yang sejumlah kebijakan terkait inovasi di kebijakan publik diadopsi dan ditransfer kepada Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan peran aktor *go-between* lebih mudah dikenali pada aktor seperti konsultan Pemerintah Kota Bandung yang mengerjakan Rencana Induk Pengembangan *Smart City* Kota Bandung. Sedangkan pada sisi Seoul ditemukan pada sejumlah pebisnis selaku investor yang dilibatkan dalam berbagai pertemuan delegasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Seoul di beberapa tempat berbeda. Peran aktor *go-between* juga dapat dikenali melalui peran KSP sebagai salah satu badan advokasi yang ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Ekonomi Korea Selatan. Selain itu juga terdapat badan seperti KOFICE (Korea Foundation for Internasional Culture Exchange) yang menjembatani dialog kemitraan *sister city* di bidang pertukaran budaya. Salah satu realisasinya masih pada mutualisme membangun Little Seoul atau Korea Street di Kota Bandung dan Little Bandung di Seoul.

Policy Diffusion

Policy diffusion mengandung arti dimana suatu pemerintahan *subnational* membuat keputusan untuk mengadopsi inovasi kebijakan yang dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintahan *subnational* di negara lain (Rodrigues & Mattioli, 2017b, hal. 6–7).

Untuk mengetahui proses kerjasama *Smart City* dalam kemitraan *Sister City* dalam proses ini tidak mudah dikenali. Hal ini disebabkan Kota Seoul memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan Kota Bandung. Kota Seoul adalah ibukota negara sekaligus pusat seluruh kegiatan bisnis, ekonomi, hiburan, pariwisata dan lainnya yang membuatnya memiliki preferensi tinggi untuk dapat menjadi kota yang nyaman sekaligus inovatif. Dengan tuntutan itu, Kota Seoul berkembang lebih progresif di bidang penerapan inovasi dan teknologi. Sehingga rumusan kebijakan yang diimplementasikan Kota Seoul cukup canggih *state of the art*.

Melihat situasi demikian, maka penelitian ini menyimpulkan proses difusi yang terjadi yang mana kategorinya jatuh pada *copying*, *emulation*, dan *combination* membutuhkan suatu penilaian dengan pertimbangan tertentu. Pemerintah Kota Bandung berpedoman dengan visi dan misi walikota terpilih memiliki peta jalan dan master plan menjadi kota yang visioner dan bermartabat – mengutip dari motto Kota Bandung sendiri. Kebijakan yang diterapkan oleh Kota Bandung, belum dapat dinilai apakah sudah terpengaruh secara langsung oleh setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh Kota Seoul.

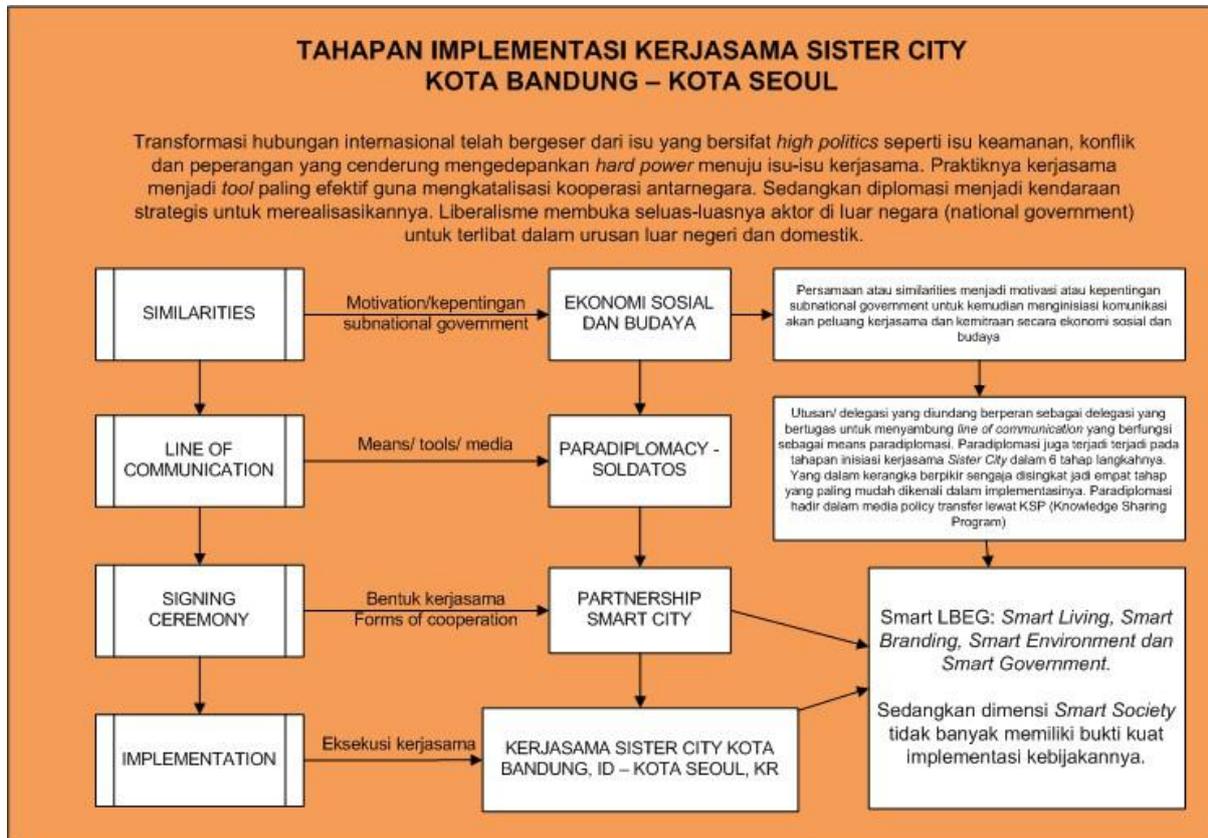
Terdapat sejumlah persoalan struktural yang ditemukan, berdasarkan hasil observasi peneliti. Persoalan tersebut terletak pada tingkat partisipasi masyarakat yang tidak sepenuhnya bergerak secara digital. Masyarakat juga tidak bergerak secara fleksibel sehingga pergerakan manusia masih cukup terbatas. Hal ini juga dikarenakan profil Kota Bandung yang tidak setara dengan profil suatu ibukota. Sebagai tambahan, Kota Bandung hanyalah ibukota provinsi dan tidak menjadi ibu kota suatu negara. Dengan demikian proses *copying*, tidak benar-benar terjadi dan belum memiliki bukti fisik yang mendukung. Namun demikian, bukan berarti *policy diffusion* tidak terjadi. Perkembangan Kota Seoul sebagai *sister city* Kota Bandung tetap menginspirasi Kota Bandung. Inspirasi ini berasal dari keinginan Kota Bandung untuk memiliki *Light Rapid Transportation* meskipun Kota Seoul bukan satu-satunya yang memiliki LRT. Kota Seoul diundang dalam memberikan advokasi kebijakan dan masukan secara profesional pengembangan LRT Kota Bandung di masa depan. Dengan tipe

diffusion, *combination* dan *emulation* lebih cenderung terjadi daripada *copying*.

Proses *combination* dan *emulation* ini dapat terjadi jika meneliti kasus per kasus inovasi. Pemerintah Indonesia, belakangan ini sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membangun jalan akan pengenalan inovasi dan *electronic government*. Sama halnya dengan pemerintahan di negara maju yang semua tata kelola saat ini telah terintegrasi secara utuh secara lintas kementerian, departemen dan pemerintah daerah secara *seamlessly*. Menyimpulkan tentang ini, jadi upaya pemerintah kota Bandung sebagian besar adalah melakukan kombinasi kebijakan yang idenya berasal dari advokasi kebijakan yang diperoleh dari Seoul melalui institusi yang ditunjuk misalnya KOFICE dan KSP. Sebagai catatan, dalam perumusan transportasi terpadu rute bus KSP menjadi institusi advokasi kebijakan yang paling berperan aktif. Tidak hanya di tingkat subnational government, KSP juga memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan Indonesia tentang sejumlah kajian yang diperlukan. Semua data tersebut dapat diakses melalui situs resmi KSP yakni <http://ksp.go.kr>. Berdasarkan tipe output, juga terdapat kebijakan pemerintah Kota Bandung yang terinspirasi dan menerapkan perubahan inovasi yang diperoleh dari advokasi KSP, namun demikian banyak kebijakan ini memiliki output berbeda dari rumusan masukan di awal. Salah satunya adalah kebijakan ketika revitalisasi sungai di kota Bandung di lakukan. Idenya ingin mewujudkan inovasi bagaimana pemerintah Kota Seoul meruba sungai yang

Bagan 1 Tahapan Implementasi Kerjasama Sister City Kota Bandung dan Kota Seoul

informan. Upaya yang lain adalah dengan melakukan perjanjian kesepahaman atau MOU yang dilanjutkan



melintas di tengah kota seoul menjadi pusat destinasi jalan-jalan yang menarik. Berikut adalah rangkuman dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung:

Pemerintah Kota Bandung melakukan *city profiling* dengan meminta bantuan konsultan yang ditunjuk. Pekerjaan konsultan ini menghasilkan suatu rancangan induk pengembangan *smart city*. Selain itu pemerintah Kota Bandung juga berulang kali mengirim delegasi/ utusan untuk berkunjung ke kota seoul sekaligus melakukan observasi langsung terhadap peluang kerjasama dan kemitraan yang dapat dibangun oleh dua kota. Hal ini terwujud dalam pengiriman utusan untuk menghadiri ASEAN Connectivity Forum, berbagai summit dengan KOFICE dan KSP. Pemerintah Kota Bandung dan Seoul juga sepakat untuk membangun representasi kearifan kota di wilayah administrasi masing-masing.

Pemerintah kota Bandung terlibat aktif untuk menjalin komunikasi dengan menghadiri berbagai festival yang mana kota Seoul mengundang perwakilan pemerintah Kota Bandung. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kota Bandung. Sayangnya belum ada informasi terinci nama festival dan waktu tersebut diungkapkan oleh informan dalam proses wawancara. Data tentang ini masih cukup sedikit secara kuantitas, namun secara kualitatif dapat ditemukan dengan melakukan wawancara dengan

dengan sejumlah perjanjian. Perjanjian ini antara lain perjanjian investasi membangun proyek LRT dengan nilai 37 juta USD. Kerjasama lain adalah dengan perusahaan swasta yang berasal dari Korea Selatan yaitu PT Total Solution Intelligentfha.

KESIMPULAN

Terdapat banyak cara dan metode untuk dapat menjelaskan peran subnational government. Tulisan ini sampai pada kesimpulan peran subnational government dalam kerjasama *smart city* melalui kemitraan *sister city* antara pemerintah Kota Bandung dan Seoul. Metode yang digunakan untuk dapat mengelai dan menjelaskan secara deskriptif peran *subnational government* adalah dengan meneliti peran setiap aktor yang terlibat. Dalam pemerintah Kota Bandung sebagai *subnational government*, maka terdapat *political will* yang lebih mendominasi dalam mendorong terwujudnya komunikasi

dengan kota mitra, Seoul. Peran intensif juga diberikan oleh seluruh pihak di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan konsultan yang dipilih. Hal yang sama juga diberikan oleh pemerintah Kota Seoul yang menyalurkan advokasi kebijakannya lewat Knowledge Sharing Program yang diawasi oleh Kementerian Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Korea Selatan. Hal yang paling penting disoroti ialah adanya komunikasi secara intensif dari Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul. Hal ini yang tidak dilakukan oleh aktor hubungan internasional seperti negara. Hal ini disebabkan jika negara mengatur hingga ke urusan pemerintah daerah, maka negara terlalu besar untuk mengatur berbagai urusan yang sebenarnya dapat dialihkan ke pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran subnational government sangat bergantung pada produk hukum yang memungkinkan alih wewenang dapat dilakukan dan sah. Namun demikian, pemerintah Kota Bandung tetap tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan transnasional yang mengatur urusan luar negeri yang menjadi domain eksklusif pemerintah nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini menuliskan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu secara substansi. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada pembimbing 1 Bu Dr. Enny Suryanjari, M.Si. sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta serta pembimbing 2 Bapak Muhammad Ikhwan Hakiki, M.I.Pol. yang kesemuanya telah meluangkan waktu dan energinya berkenan memberi masukan dalam setiap bagian tulisan tugas akhir. Kepada Randy Bramastya yang berkenan untuk membuat tulisan ini lebih lengkap daripada seharusnya sekaligus rekan riset dan rekan diskusi saya setiap waktu. Tulisan ini merupakan ekstrak keempat dari substansi tugas akhir yang disusun oleh penulis yang ketiganya telah disubmit pada jurnal yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Morgan, "High Politics, Low Politics: Toward a Foreign Policy for Western Europe," ed, 1973.
- [2] J. Stiglitz, *Globalization and {Its} {Discontents}*: Penguin UK, 2015.

- [3] C. Jönsson and M. Hall, "Essence of Diplomacy," *Essence of Diplomacy*, 2005.
- [4] G. M. A. Rodrigues and T. Mattioli, "Paradiplomacy, Security Policies and City Networks: the Case of the Mercocities Citizen Security Thematic Unit," *Contexto Internacional*, vol. 39, pp. 569-587, 2017.
- [5] F. Aldecoa and M. Keating, *Paradiplomacy in action: the foreign relations of subnational governments*, 1999.
- [6] I. B. Neumann and O. Wæver, *The future of international relations, masters in the making?*, 2005.
- [7] H. A. Kissinger, "Force and Diplomacy in the Nuclear Age," *Foreign Affairs*, 1956.
- [8] T. Liu and Y. Song, "Chinese Paradiplomacy: A Theoretical Review," *SAGE Open*, vol. 10, 2020.
- [9] "Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ed, 2014.
- [10] A. Pujayanti, "Peran Daerah dalam Diplomasi Ekonomi," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, vol. 7, pp. 1-13, 2018.
- [11] I. Sister City, *2019 Sister City International Directory Membership*, 2019.
- [12] J. F. Lilihata and M. S. Yayusman, "Diplomasi Kota dalam Mewujudkan Zhongguo Meng: Hubungan China- Indonesia ditinjau melalui kerjasama kota Kembar antara Surabaya-Xiamen dan Semarang- Beihai," in *Menghadapi Kebangkitan China*, N. R. Yuliantoro and H. Akbar, Eds., ed Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- [13] N. R. Yuliantoro, *Menghadapi Kebangkitan Cina*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.